

Hukum

**Inspektorat Perketat, BPK
Siap Audit Infrastruktur**

PONTIANAK. Rencana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar melakukan audit terfokus terhadap aset dan infrastruktur Pemprov semester II Tahun 2011 disikapi Inspektorat Kalbar. Upaya pengawasan akan diperketat.



"Kita akan fokus melakukan pengawasan," tegas Drs John Itang Oe MM, Kepala Inspektorat Kalbar kepada Equator via selulernya, pekan lalu.

Pengawasan dilakukan untuk mencegah adanya penyimpangan penggunaan anggaran dalam proyek tersebut. "Kita tidak mencari kesalahan orang. Tapi kalau ada yang salah, kita harapkan bisa diperbaiki," ucap John Itang.

Sebagai badan internal yang mengawasi penggunaan keuangan pemerintah, Inspektorat tentu sangat berharap penggunaan keuangan pada proyek-proyek infrastruktur tidak bermasalah sehingga akan menjadi temuan BPK di kemudian hari. Hal yang sama juga diharapkan tidak terjadi pada seluruh kegiatan yang dananya bersumber dari APBD Kalbar.

■ Halaman 7

Inspektorat Perketat

.... dari halaman 1

Khusus untuk pengawasan proyek infrastruktur, akan sedikit lebih diperhatikan. Tak menutup kemungkinan laporan keuangan pada proyek infrastruktur akan dikonfrontir dengan kondisi di lapangan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi, Ir Jakius Sinyor kepada Equator beberapa waktu lalu memastikan pengawasan proyek-proyek infrastruktur di instansi yang dipimpinnya akan diperketat untuk mencegah adanya temuan. "Kita akan evaluasi kinerja para kontraktor

yang mengerjakan proyek infrastruktur," tegas Jakius.

Langkah evaluasi itu dilakukan sebagai bentuk pengawasan PU terhadap pekerjaan proyek infrastruktur yang ada di dinas tersebut. PU akan memonitor setiap pekerjaan kontraktor agar sesuai kontrak. Sehingga tidak menjadi temuan BPK di kemudian hari. "Kalau nanti kesalahan ada pada kontraktor, kita akan blacklist (masuk daftar hitam, red)," tegas Jakius.

Selain mem-blacklist perusahaan nakal, pihaknya juga akan

melaporkan perusahaan bersangkutan ke asosiasi atau lembaga yang menaunginya. Dengan laporan itu, Dinas PU berharap asosiasi bisa memberikan sanksi kepada perusahaan dimaksud, dan memberikan rekomendasi untuk tidak lagi mengikuti tender di kemudian hari.

"Kita kan tidak bisa melarang perusahaan mengikuti tender. Tapi kalau sudah ada larangan dari asosiasi yang menaunginya, baru kita bisa menggugurkan perusahaan tersebut," pungkas Jakius. (bdu)